

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Kekayaan Negara Dipisahkan

Melalui Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, negara Indonesia telah diamanatkan untuk mengatur keuangan negara yang didasarkan pada kedaulatan rakyat. Keuangan negara kemudian disusun dan diatur dalam sebuah undang-undang. Karena adanya amanat tersebut, terbitlah salah satu undang-undang mengenai keuangan negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.

Keuangan negara meliputi banyak hal. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, salah satu lingkup keuangan negara adalah pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Menurut PMK Nomor 246 Tahun 2016, dijabarkan mengenai kekayaan negara dipisahkan yakni kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lainnya yang diinvestasikan secara jangka panjang dan berkelanjutan oleh pemerintah pusat dan dikelola secara terpisah dari mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Objek pengelolaan kekayaan negara dipisahkan terdiri dari :

- a. Badan Usaha
- b. Badan Usaha Milik Negara
- c. Lembaga Keuangan dan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum
- d. Badan Hukum Lainnya

Pemegang kuasa pengelola kekayaan negara dipisahkan dipegang oleh Kementerian Keuangan. Pada Kementerian Keuangan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan dijalankan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) pada Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan (KND). Direktorat KND memiliki tugas sebagai perumus kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara dipisahkan. Selain tugas tersebut, fungsi dari Direktorat KND menurut PMK Nomor 118/PMK.01/2021 adalah sebagai berikut :

- a. penyiapan perumusan di bidang kekayaan negara dipisahkan
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara dipisahkan
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kekayaan negara dipisahkan
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kekayaan negara dipisahkan
- e. penyiapan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekayaan negara dipisahkan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha di bidang kekayaan negara dipisahkan

2.2 Konsep Badan Usaha Milik Negara

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Badan Usaha Milik Negara yang disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar

modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN sendiri terbagi menjadi dua yaitu persero dan perum. Apabila lebih dijabarkan kembali, maka BUMN terdiri dari perusahaan perseroan, perusahaan perseroan terbuka, dan perusahaan umum.

Secara umum dan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, selain meraih keuntungan, BUMN juga memiliki peran untuk berkontribusi dalam perkembangan ekonomi nasional di Indonesia. Selain itu, BUMN juga didirikan dengan maksud dapat memberikan dan menyediakan barang maupun jasa yang dapat memenuhi hajat masyarakat. Karena keterkaitannya dengan perekonomian negara, modal BUMN masuk ke dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Modal BUMN sendiri tidak hanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun juga dapat berasal dari kapitalisasi cadangan maupun sumber lainnya.

Tidak hanya di Indonesia, di luar negeri juga terdapat banyak BUMN dengan sebutan istilah lain seperti *State-Owned Enterprises (SOEs)*, *Government-Owned Enterprises (GOEs)*, *parastatals*, maupun *State-Owned Company (SOC)*. Di luar negeri sendiri, konsep BUMNnya juga tidak jauh berbeda dengan konsep BUMN yang berada di Indonesia. Kepemilikan dalam BUMN di luar negeri memiliki karakteristik yang sama seperti di Indonesia, yaitu dapat dimiliki keseluruhannya milik pemerintah maupun dalam bentuk kerja sama dengan swasta. BUMN di luar negeri dibentuk dalam bentuk sebuah badan yang independen meskipun pada akhirnya sesuai dengan konsep pada umumnya, paling tidak

setengah kepemilikan dari BUMN dimiliki oleh negara (Roper & Schoenberger-Orgad, 2011).

2.3 ASEAN

Association of Southeast Asian Nations atau disingkat ASEAN, merupakan sebuah organisasi regional yang dimiliki oleh negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967, hingga saat ini ASEAN telah beranggotakan 10 negara yang terdiri dari Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Thailand, Myanmar, Filipina, Singapura, Malaysia, dan Vietnam. ASEAN memiliki sebuah legal framework yang bernama *ASEAN Charter* atau Piagam ASEAN berisikan aturan-aturan, nilai, tujuan, dan menghadirkan akuntabilitas serta kepatuhan di dalam komunitas.

Maksud dan tujuan didirikannya ASEAN adalah :

- a. Mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, sosial, dan pengembangan budaya di dalam kawasan melalui usaha bersama dalam semangat kesetaraan dan kerja sama dalam rangka memperkuat pondasi demi komunitas Asia Tenggara yang damai dan sejahtera
- b. Mendukung perdamaian dan stabilitas regional dengan menghargai keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antar negara pada kawasan ASEAN serta patuh terhadap prinsip yang telah dikemukakan pada Piagam ASEAN
- c. Mendukung kolaborasi dan hubungan timbal balik terkait kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknis, ilmiah, serta administrasi
- d. Saling memberikan bantuan dalam bentuk pemberian fasilitas pelatihan dan penelitian pada bidang pendidikan, profesi, teknis, dan administrasi

- e. Berkolaborasi lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan sektor industri, agrikultur, dan perdagangan. Hal ini termasuk meningkatkan fasilitas transportasi dan komunikasi serta melakukan studi terkait komoditas perdagangan internasional dengan tujuan utama meningkatkan standar hidup masyarakat ASEAN.
- f. Mendorong studi terkait Asia Tenggara
- g. Memelihara kerjasama yang erat dan menguntungkan dengan organisasi internasional yang sudah berdiri maupun organisasi regional yang memiliki maksud dan tujuan yang sama dan terus mencari cara untuk agar kerjasama dapat terjalin lebih baik diantara organisasi-organisasi tersebut

Dalam ASEAN, kerja sama yang terjalin terbagi ke dalam berbagai sektor. Salah satu sektor yang cukup strategis, yaitu minyak dan gas bumi, memiliki bentuk kerja sama yang tergabung ke dalam sebuah komunitas yaitu *ASEAN Council On Petroleum* (ASCOPE). Anggota ASCOPE merupakan perusahaan minyak dan gas bumi nasional yang berada di masing-masing anggota ASEAN. Dilansir dari *website* milik ASEAN Council on Petroleum, (ASCOPE) sendiri memiliki gugus tugas yang terbagi menjadi empat, yaitu eksplorasi dan produksi, advokasi gas, kemitraan komersial, dan penelitian terkait kebijakan dan pengembangan kemampuan.

2.4 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah gambaran kondisi finansial perusahaan pada suatu periode tertentu yang menyangkut aspek pengumpulan dana maupun dana yang disalurkan, yang biasanya diukur dengan indikator likuiditas, profitabilitas, dan

kecukupan modal (Jumingan, 2006). Sedangkan menurut Sanjaya & Rizky (2018), kinerja keuangan merupakan capaian yang berhasil diraih oleh perusahaan dalam mengelola keuangan perusahaan sehingga dapat menghasilkan pengelolaan keuangan yang baik. Kinerja keuangan sendiri dapat dilihat melalui analisis pada laporan keuangan yang dirilis oleh perusahaan, baik secara kuartalan maupun tahunan. Laporan keuangan adalah laporan yang memberikan gambaran mengenai keadaan perusahaan pada suatu periode tertentu. Secara umum, tujuan dari analisis laporan keuangan adalah untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan sehingga dapat diketahui kelemahan dan kekuatan dari perusahaan (Kasmir, 2016) dan melihat bagaimana kinerja keuangan perusahaan yang mencerminkan hasil dari pengelolaan sumber daya yang dimiliki perusahaan dalam mencapai efektivitas dan efisiensi di bidang keuangan (Fahmi, 2012). Tujuan dari mengukur dan mengetahui kinerja keuangan suatu perusahaan menurut Munawir (2010) antara lain :

- 1) Mengetahui tingkat likuiditas, kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban saat terdapat penagihan
- 2) Mengetahui tingkat profitabilitas, kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba
- 3) Mengetahui aktivitas usaha untuk memastikan keuangan perusahaan dalam kondisi stabil
- 4) Mengetahui tingkat solvabilitas, untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban apabila perusahaan dilikuidasi

Salah satu cara dalam mengukur kinerja keuangan adalah dengan mengetahui rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan kegiatan

mengkomparasi angka yang terdapat dalam laporan keuangan dengan membagi antara satu angka dengan angka yang lainnya (Kasmir, 2016). Jenis-jenis rasio keuangan antara lain sebagai berikut :

- 1) Rasio likuiditas yang terdiri dari *current ratio* atau rasio lancar dan *quick ratio/acid test* atau rasio sangat lancar
- 2) Rasio solvabilitas terdiri dari *Debt Ratio*, *Times Interest Earned*, *Fixed Charge Coverage*, *Cash Flow Coverage*, *Total Debt to Equity Ratio*, *Long Term Debt to Equity Ratio*, *Tangible Asset Debt Coverage*
- 3) Rasio aktivitas terdiri dari *Inventory Turnover*, *Average Collection Period*, *Fixed Asset Turnover*, *Total Asset Turnover*, *Receivable Turnover*, *Average's day Inventory*, *Working Capital Turnover*
- 4) Rasio profitabilitas yang terdiri *Profit Margin on Sales*, *Basic Earning Power*, *Return on Total Asset*, *Return on Total Equity*, *Gross Profit Margin*, *Operating Income Ratio*, *Net Profit Margin*. *Earning Power to Total Investment*, *Net Earning Power Ratio*, dan *Rate of Return Owners*
- 5) Rasio Pertumbuhan terdiri dari pertumbuhan penjualan, pertumbuhan laba bersih, pertumbuhan pendapatan per saham, dan pertumbuhan dividen
- 6) Rasio penilaian terdiri dari rasio harga saham terhadap pendapatan dan *Market to Book Value Ratio*

Terdapat dua cara yang dapat dilakukan dalam melakukan analisis rasio keuangan. Cara tersebut menurut Syamsuddin (2012) terdiri dari *Time Series Analysis* (TSA) dimana rasio keuangan antar perusahaan dibandingkan selama

periode penelitian. Cara kedua *Cross-Sectional Analysis* (CSA) yang dilakukan dengan cara membandingkan rasio keuangan antar perusahaan pada satu waktu yang sama.

2.5 Konsep Analisis *Du Pont System*

Analisa *Du Pont System* menurut Weston & Brigham (1994) adalah analisa yang mencakup seluruh rasio aktivitas dan margin keuntungan untuk memperlihatkan bagaimana rasio-rasio tersebut mempengaruhi profitabilitas. Sedangkan menurut Soliman (2008), *Du Pont System* adalah analisis yang sering digunakan dalam melakukan analisa dalam laporan keuangan yang menguraikan *Return on Net Operating Asset*, atau *Return on Asset* (ROA), menjadi dua komponen yaitu *profit margin* dan *asset turnover*. Selain itu, Titman et al. (2018) menambahkan *Du Pont System* juga menguraikan Return on Equity menjadi tiga komponen yakni *net profit margin*, *total asset turnover*, dan *equity multiplier*. *Equity Multiplier* digunakan untuk mengetahui bagaimana pendanaan dari utang mempengaruhi ROE. Apabila dijabarkan kembali, *Du Pont System* adalah teknik menganalisa laporan keuangan secara menyeluruh yang berfokus pada dan *Return on Equity* (ROE) dan *Return on Asset* (ROA)/*Return on Investment* (ROI) untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi penggunaan aktiva dan modal dalam menghasilkan laba ditinjau dari hutang, perputaran aktiva, dan margin keuntungan (Azizah et al., 2021).

Sehingga, dalam melakukan analisis dengan menggunakan *Du Pont System*, rasio yang dijadikan tolak ukur dalam menentukan perhitungan adalah rasio profitabilitas *Net Profit Margin*, rasio aktivitas *Total Asset Turnover*, dan *Financial*

Leverage Multiplier/Equity Multiplier untuk menentukan ROA dan ROE. Langkah-langkah dalam melakukan analisis *Du Pont System* adalah sebagai berikut :

1) Menentukan *Net Profit Margin*.

Semakin baik rasio *Net Profit Margin*, maka perusahaan dianggap memiliki kinerja yang baik dikarenakan semakin tinggi rasio NPM, maka semakin efisien sebuah perusahaan dalam meraih laba. Rumus NPM adalah sebagai berikut :

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Sales}}$$

2) Menentukan *Total Asset Turnover*

Rasio TATO menentukan seberapa perputaran aset dalam rangka meraih laba. Maka dari itu, semakin tinggi rasio dari TATO, mengartikan perusahaan memiliki manajemen perputaran aset yang baik. Rumus dari TATO adalah :

$$\text{Total Asset Turnover} = \frac{\text{Sales}}{\text{Total Asset}}$$

3) Menentukan *Equity Multiplier*

Equity Multiplier digunakan sebagai alat ukur untuk menggambarkan seberapa besar aset yang didanai oleh utang. Semakin kecil rasio ini, maka semakin baik kinerjanya karena porsi untuk pembayaran bunga semakin kecil (Darmawan, 2020). Rumus dari *Equity Multiplier* adalah sebagai berikut :

$$EM = \frac{\text{Total Asset}}{\text{Total Shareholder Equity}}$$

4) Menghitung Return on Asset (ROA). Rumus ROA dalam analisis *Du Pont System* menurut Gitman & Zutter (2015) adalah sebagai berikut :

$$ROA = \text{Net Profit Margin} \times \text{Total Asset Turnover}$$

Apabila dijabarkan kembali maka menjadi sebagai berikut :

$$ROA = \frac{Net\ Income}{Sales} \times \frac{Sales}{Total\ Asset}$$

5) Menghitung Return on Equity (ROE). Rumus *Return on Equity* (ROE) dalam *Du Pont System*, digunakan rumus sebagai berikut :

$$ROE = ROA \times Equity\ Multiplier$$

Equity Multiplier juga sering dikenal sebagai Financial Leverage Multiplier (FLM)

Apabila dijabarkan kembali, maka rumus ROE menjadi sebagai berikut:

$$ROE = \frac{Net\ Income}{Sales} \times \frac{Sales}{Total\ Asset} \times \frac{Total\ Asset}{Total\ Shareholder\ Equity}$$

Kelebihan dalam menggunakan analisis *Du Pont System* dalam menilai kinerja keuangan menurut Munawir (2010) adalah sebagai berikut :

- a. Teknik analisisnya bersifat menyeluruh
- b. Dapat membandingkan efisiensi penggunaan modal kerja perusahaan dengan perusahaan sejenis
- c. Sebagai tolak ukur profitabilitas dari produk yang dihasilkan perusahaan
- d. Sebagai alat ukur efisiensi yang dilakukan pada divisi yang terdapat di perusahaan

Menurut Doorasamy (2016), *Du Pont System* adalah salah satu metode yang sering dipilih dalam menghitung estimasi nilai pasar dari perusahaan, menunjukkan seberapa besar *leverage* sebuah perusahaan agar dapat meningkatkan profitabilitas di masa depan. Maksud dari hal tersebut adalah perusahaan diharapkan dapat menjadikan hasil analisis sebagai evaluasi untuk meningkatkan profitabilitas dengan cara melakukan efisiensi penggunaan aset yang kemudian diharapkan

dapat menarik investor. Selain kelebihan-kelebihan diatas, analisis *Du Pont System* juga memiliki kekurangan, yaitu :

- a. Terdapat fluktuasi dalam nilai daya beli
- b. ROA antar perusahaan sulit dibandingkan karena terdapat perbedaan kebijakan akuntansi antar perusahaan
- c. ROA pada teknik ini tidak dapat dijadikan pembanding apabila terdapat dua permasalahan dan tidak dapat dijadikan sebagai simpulan yang memuaskan